

DAFTAR PUSTAKA

- Alaslan, A. (2021). *Formulasi Kebijakan Publik*. Purwokerto Selatan, Jawa Tengah : CV. Pena Persada.
- Andriani, N. S. (2016). *Kebijakan Responsif Disabilitas: Pengarusutamaan Managemen Kebijakan di Level Daerah, Nasional dan Internasional*. 191.
- Anhar, P. M. (2019). *Responsif Disabilitas: Prioritas Kebijakan dalam sebuah Manajemen di Indonesia*. 193.
- Australia, C. o. (1993, Desember 16). Retrieved from <https://www.findandconnect.gov.au/guide/wa/WE01042>
- Disabilitas, P. P.-U. (2016, April 15). *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas*. Retrieved from Undang- Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas : <https://peraturan.bpk.go.id/Details/37251/uu-no-8-tahun-2016%20/>
- Disabilitas, U.-U. N. (2016, April 15). Retrieved from <https://peraturan.bpk.go.id/Details/37251/uu-no-8-tahun-2016>
- Firda Silvia Pramashela, H. A. (2022). *Aksesibilitas Pelayanan Publik bagi Penyandang Disabilitas di Indonesia*. 230.
- Indonesia, B. P. (2023, Agustus 24). Retrieved from Berita Konsultasi Publik Rencana aksi Daerah Provinsi Sulawesi Selatan tentang Penyandang: <https://bakti.or.id/berita/konsultasi-publik-rencana-aksi-daerah-rad-provinsi-sulawesi-selatan-tentang-penyandang>
- J.Moleong, Lexy.2014. *Metode Penelitian Kualitatif* , Edisi Revisi. PT Remaja Rosdakarya, Bandung. Kecamatan. 23.
- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. (2015). *Analisis Gender Dalam Pengelolaan Konflik Sumberdaya Hutan*. Diakses pada 20 Agustus 2024 , dari https://elearning.menlhk.go.id/pluginfile.php/854/mod_resource/content/1/analisis%20gender/pengarusutamaan_gender.html#:~:text=Pengarusutamaan%20gender%20merupakan%20rangkaian%20strategi,luar%20dan%20atau%20pihak%20eksternal.
- Kurniawan, I. P. (2020). *Analisis Kebijakan Publik* . 6-7.
- Lalapraing, Y. N. (2016). *Pemberdayaan Bagi Penyandang Disabilitas* . 3. Maulidiah, S. S. (2014). *Pelayanan Publik, Pelayanan Terpadu Administrasi LSM Sigap Yogyakarta* , 270.

- Ni Nyoman Mika Putri Karuniasih, W. B. (2022). Tinjauan Fenomenologi atas Stigmatisasi Sosial Penyandang Disabilitas Tunarungu. 2.
- Novrizaldi. (2021, April 08). Kabupaten dan Kota Wajib Miliki ULD Bidang Ketenagakerjaan. Retrieved from KEMENKO PMK : <https://www.kemenkopmk.go.id/kabupaten-dan-kota-wajib-miliki-uld-bidang-ketenagakerjaan>
- Nuraviva, L. (2017). Aksesibilitas Penyandang Disabilitas terhadap Fasilitas Publik di Kota Surakarta. 15.
- Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas
- Pohan, S. (2023). Komunikasi Pelayanan Publik di Bidang Kesehatan: Studi pada Rumah Sakit Universitas Sumatera Utara. 4.
- PUPR, I. K. (2006, Desember 01). Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat . Retrieved from Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat: https://jdih.pu.go.id/detail-dokumen/1544/1#div_cari_detail
- Rio Agustian Wiranata, M. E. (2022). Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik Sebagai *Values Of Law* atas Pelayanan Publik Terhadap Penyandang Disabilitas. 210.
- Rizal, A. (2016). anchang Bangun Sistem Informasi Lowongan Kerja Pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Gresik.
- Roebyantho, H. (2006). Implementasi Aksebilitas Non Fisik (Pelayanan Khusus Bagi Penyandang Cacat Di Enam Provinsi) . 47.
- Setiawan, G. (2004). Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum .
- Shaleh, I. (2018). Implementasi Pemenuhan Hak bagi Penyandang Disabilitas Ketenagakerjaan di Semarang. Kanun Jurnal Ilmu Hukum, 20(1). doi: <https://doi.org/10.24815/kanun.v20i1.9829>
- Soekanto, Soerjono, Teori Peranan, (Jakarta: Bumi Aksara, 2002), hal. 243
- Supanji, T. H. (2023, Juni 15). Retrieved from <https://www.kemenkopmk.go.id/pemerintah-penuhi-hak-penyandang-disabilitas-di-indonesia> Saat ini jumlah penyandang disabilitas, disabilitas terbanyak pada usia lanjut
- Syafi'ie, M. (2014). Pemenuhan Aksebilitas Bagi Penyandang Disabilitas.

Tan, W., & Ramadhani, D. (2020). Pemenuhan Hak Bekerja bagi Penyandang Disabilitas Fisik di Kota Batam. *Jurnal HAM*, 11(1), 27-37.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009. (2009). Retrieved from <https://peraturan.bpk.go.id/Details/38748/uu-no-25-tahun-2009>

Vanaja Syifa Radissa, H. W. (2020). Pemenuhan Kebutuhan Dasar Penyandang Disabilitas pada Masa Pandemi Covid-19. 61-69.

Wijaksono, E. (2023). Hak Penyandang Disabilitas Dalam Pelayanan Publik di Kecamatan Sabbang Selatan . 9.